



## ANALISIS TINGKAT PENCAPAIAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

Adhitya Wardhana<sup>1</sup> Bayu Kharisma<sup>2</sup>

### Abstract

#### Keywords:

attainment rate;  
government expenditure for  
education; government  
expenditure for health;  
infrastructure,

*This study aims to analyze the extent to which the independent variables, namely education sector government spending (PPEND), student and teacher ratio (RMG), GRDP per capita (PDRBKAP), health sector government spending (PKES), and some schools (INFRA) can influence the dependent variables, namely, the 9-year compulsory education program is shown by completing elementary and junior high school education. The scope of the research is regional scale using data combined from cross sections and time series (panel data). The research period starts from 2016-2020. The model used is two equations by separating the independent variables of elementary and junior high school graduates. The estimation results using panel data regression analysis show that only the GRDP per capita variable (PDRBKAP) does not significantly influence the elementary school and junior high school variables, while the other independent variables are government expenditure in the education sector (PPEND), student and teacher ratio (RMG), government spending in the health sector (PKES) and the number of schools (INFRA) have a significant effect on the dependent variable in each equation*

#### Kata Kunci:

tamatan pendidikan;  
pengeluaran sektor  
pendidikan; pengeluaran  
pemerintah sektor kesehatan;  
infrastruktur

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPEND), rasio murid dan guru (RMG), PDRB perkapita (PDRBKAP), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PKES) dan jumlah sekolah (INFRA) dapat mempengaruhi variabel tidak bebas yaitu program wajib belajar 9 tahun yang ditunjukkan oleh tamatan pendidikan SD dan SMP. Ruang lingkup penelitian adalah skala provinsi dengan menggunakan data yang tergabung dari *cross section* dan *time series* (panel data). Periode penelitian dimulai dari tahun 2016-2020. Model yang digunakan sebanyak dua persamaan dengan memisahkan variabel tidak bebas lulusan SD dan SMP. Hasil estimasi dengan menggunakan analisis regresi panel data menunjukkan bahwa hanya variabel PDRB perkapita (PDRBKAP) yang tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan variabel bebas lainnya yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPEND), rasio murid dan guru (RMG), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PKES) dan jumlah sekolah (INFRA) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tidak bebas dalam setiap persamaan

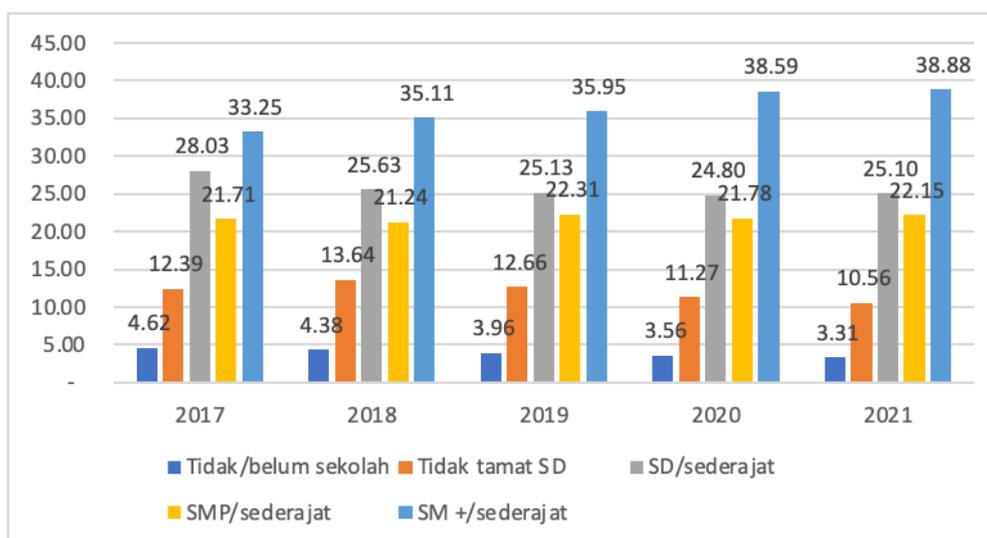
#### Koresponding:

Departemen Ilmu Ekonomi  
Universitas Padjadjaran Jawa  
Barat, Bandung  
Email:  
[adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id](mailto:adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id)

## PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia tertuang dari program pendidikan, dimana program pendidikan yang dijadikan salah satu prioritas di Indonesia adalah program wajib belajar (WAJAR) sembilan tahun. Keberhasilan program tersebut dapat dilihat dari penduduk yang dapat menamatkan pendidikan dan lama pendidikan. Penduduk yang dilihat dari lama pendidikan menunjukkan kesadaran penduduk akan manfaat pendidikan.

Perkembangan pendidikan antar provinsi di Indonesia dipengaruhi oleh pendidikan penduduk berdasarkan jenjang pendidikan. Apabila melihat perkembangan tamatan pendidikan usia 15 tahun ke atas menunjukkan bahwa jenjang pendidikan lanjut lebih rendah dibandingkan pendidikan dasar. Pada Gambar 1, menunjukkan bahwa tamatan SMA sederajat lebih besar dibandingkan tamatan Sekolah Dasar dan SMP sederajat. Selain itu, beberapa hal yang memprihatinkan terlihat dari persentase penduduk yang tidak bersekolah dan tidak tamat SD cenderung tidak mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Namun ada perkembangan yang cukup mencolok dari tamatan sekolah dasar lebih besar dalam persentase terhadap SMP sederajat.

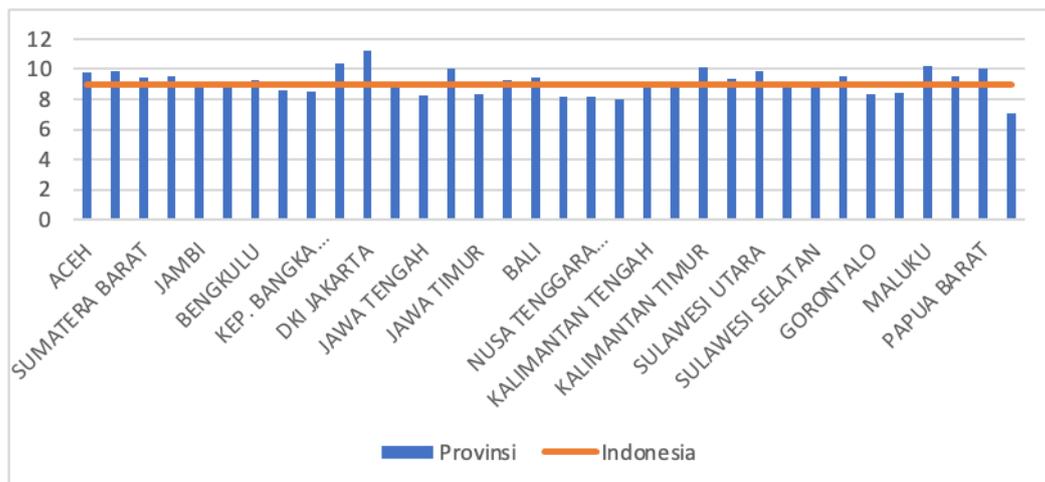


Sumber: BPS (2021)

**Gambar 1.**  
**Tamatan Pendidikan Berdasarkan**  
**Tingkat Pendidikan Tahun 2017-2021 (persen)**

Kondisi tamatan sekolah dasar lebih besar dari tamatan SMP, secara tidak langsung akan berimbas terhadap program wajib belajar 9 tahun. Persentase tamatan sekolah dasar yang lebih besar dari SMP maka sulit untuk dipenuhi dalam mencapai program wajib belajar 9 tahun. Target wajib belajar umumnya belum mampu untuk dipenuhi oleh beberapa provinsi di Indonesia, dimana ini terlihat dari Indikator lama pendidikan yang diprosikan melalui Rata Lama Sekolah (RLS). Dalam hal ini, Pemerintah daerah menjadi bagian teknis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Indikator RLS yang dilihat dari masing-masing provinsi dengan membandingkan RLS Indonesia masih banyak didominasi oleh nilai RLS dibawah nilai RLS Indonesia. Dengan demikian, nilai RLS yang dijadikan indikator keberhasilan program sembilan tahun belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat pada Gambar 2 yang menunjukkan masih banyak provinsi dengan RLS dibawah nasional. Oleh karena itu, baik Pemerintah pusat maupun daerah berupaya meningkatkan kesadaran

penduduk agar program wajib belajar dapat tercapai. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.

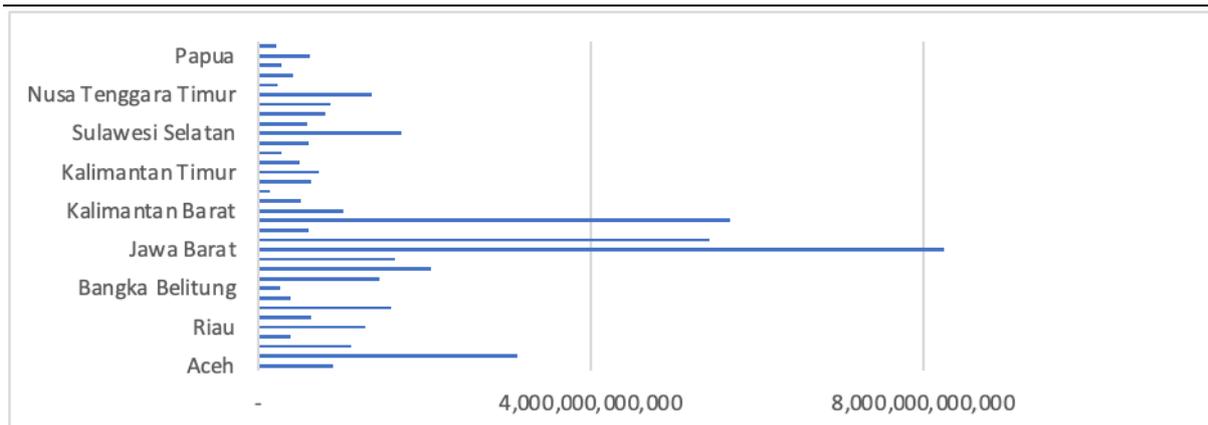


Sumber: BPS (2021)

**Gambar 2.**  
**Rata Lama Sekolah Provinsi di Indonesia Tahun 2021**

Pada Gambar 1 dan 2 dapat disimpulkan hanya beberapa beberapa provinsi saja yang dapat memenuhi program pemerintah di sektor pendidikan, khususnya wajib belajar sembilan tahun (WAJAR 9 Tahun). Hal ini secara tidak langsung dapat menimbulkan ketimpangan pendidikan. Adanya pembangunan infrastruktur pendidikan diharapkan menjadi salah satu penentu keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan program pendidikan. Infrastruktur yang memadai seharusnya dapat mengubah kualitas sumber daya manusia menjadi lebih baik. Infrastruktur pendidikan yang sesuai kebutuhan pendidikan tidak terlepas dari perencanaan belanja pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Perencanaan keuangan pemerintah di sektor pendidikan akan menentukan kualitas sarana pendidikan.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 yang mengatur dana pendidikan diluar gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan sebanyak 20% dari APBD dan APBN, dimana Pemerintah Daerah mendapatkan amanat dari Pusat untuk mengalokasi dana APBD sektor pendidikan. Besaran nilai dari dana pendidikan tersebut untuk melayani masyarakat untuk bersekolah formal. Kondisi pengeluaran pemerintah daerah untuk sektor pendidikan dapat dilihat pada Gambar 3. Pada Gambar 3 masih terjadi variasi belanja pemerintah di sektor pendidikan. Provinsi bagian Indonesia Barat memiliki pengeluaran pemerintah sektor pendidikan cukup besar terutama Provinsi yang berada di Pulau Jawa.



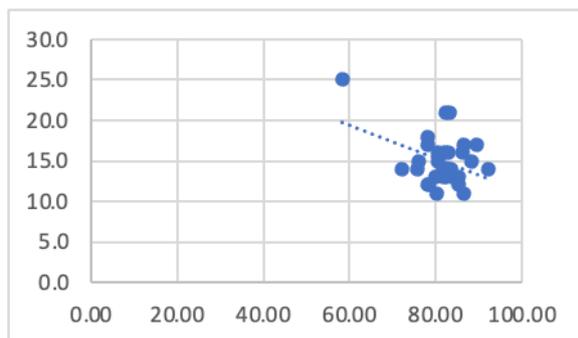
Sumber : DJPK, Kemenkeu (2019)

**Gambar 3.**  
**Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan di Provinsi Indonesia 2019**

Peningkatan SDM yang diamanatkan kepada daerah belum berjalan secara optimal, termasuk belanja pemerintah daerah sektor pendidikan menentukan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, beberapa pemerintah daerah memiliki belanja pendidikan yang cukup besar dibandingkan daerah lain, hal ini dilihat besaran dari jumlah penduduk. Semakin padat jumlah penduduk maka pelayanan pendidikan semakin besar yang akan berdampak terhadap belanja pemerintah sektor pendidikan. Sedangkan bagi daerah yang memiliki belanja pemerintah sektor pendidikan yang rendah dapat diakibatkan oleh rendahnya umur bersekolah dan kurang kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Dengan demikian, dari kondisi belanja pemerintah daerah tersebut masih membutuhkan proses yang cukup panjang dalam meningkatkan sektor pendidikan.

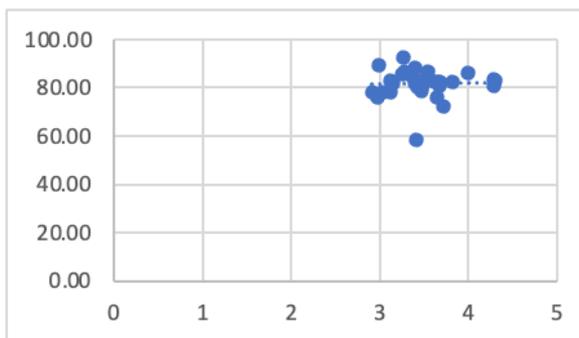
Output pendidikan antara lain ditentukan oleh modal pendidikan yang diprosikan dengan belanja sektor pendidikan. Oleh karena itu, kinerja pemerintah dalam merencanakan anggaran pendidikan menjadi kunci penting dalam meningkatkan output pendidikan. Tamatan pendidikan menjadi salah satu variabel yang diprosikan sebagai output pendidikan. Peningkatan tamatan pendidikan menjadi salah satu keberhasilan pemerintah daerah dengan mengeksplorasi belanja pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan infrastruktur dan peningkatan produktivitas guru dan murid. Output pendidikan yang dilihat dari tamatan pendidikan masyarakat tidak terlepas dari peran pemerintah pusat maupun daerah dalam suatu kebijakan. Infrastruktur pendidikan sebagai salah satu kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pendidikan masih terjadi berbagai permasalahan maupun hambatan. Fasilitas pendidikan menjadi bagian bentuk infrastruktur sekolah yang dapat diprosikan dari rasio murid guru dan jumlah sekolah.

Dilihat dari hubungan rasio murid dan guru dengan tamatan pendidikan sejauh ini memiliki hubungan negatif. Jumlah guru dalam menangani murid dalam proses belajar belum berjalan dengan optimal. Semakin besar jumlah penduduk maka akan meningkatkan jumlah penduduk usia pendidikan, sehingga pemerintah perlu meningkatkan fasilitas pendidikan seperti meningkatkan jumlah guru, jumlah kelas maupun jumlah sekolah. Namun dari hasil Gambar 4 belum menunjukkan hasil yang optimal dalam meningkatkan output pendidikan. Adanya perhatian bagi pemerintah untuk meninjau kembali kesesuaian jumlah guru dalam memberikan pendidikan kepada murid. Disisi pembangunan sekolah menunjukkan hubungan positif antara rata-rata tamatan pendidikan dengan jumlah sekolah (lihat Gambar 5). Hal ini menunjukkan kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan di setiap daerah Indonesia, terutama adanya kebijakan pemerintah dalam jalur masuk sekolah dasar dan menengah dengan menggunakan jalur zonasi masih terjadi ketimpangan wilayah sekolah antar daerah yang dekat dengan jumlah sekolah dengan jarak yang jauh dengan sekolah.



Sumber : BPS, 2020

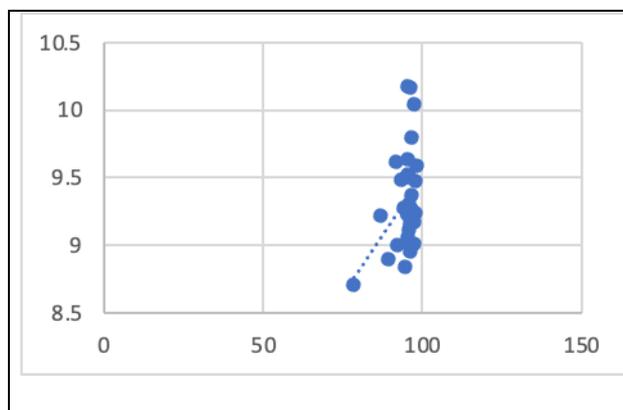
**Gambar 4.**  
**Scatter Plot Rasio Murid Guru dengan Rata-Rata Tamatan Pendidikan Provinsi di Indonesia Tahun 2020**



Sumber : BPS, 2020

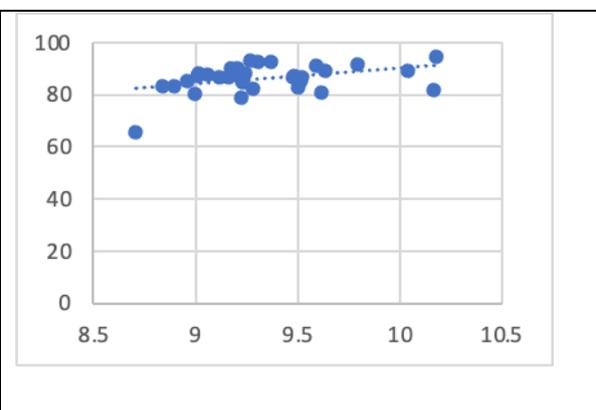
**Gambar 5.**  
**Scatter Plot Jumlah Sekolah dengan Rata-Rata Tamatan Pendidikan Provinsi di Indonesia Tahun 2020**

Adanya program wajib belajar sembilan tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah diharapkan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan selama sembilan tahun dan merencanakan anggaran pendidikan untuk memenuhi program wajib belajar. Hasil dari *scatter plot* menunjukkan hubungan searah antara anggaran pendidikan dan tamatan pendidikan. Selanjutnya, hubungan anggaran pendidikan dengan lulusan SD memiliki trend yang cukup tajam, dimana anggaran pendidikan tidak dirasakan sepenuhnya oleh hasil tamatan sekolah dasar (lihat Gambar 6 dan 7). Sementara itu, dilihat dari hubungan anggaran pendidikan dengan lulusan tingkat SMP sangat berbeda dengan *scatter plot* tingkat sekolah dasar, dimana anggaran pendidikan jenjang SMP untuk terealisasi dengan baik dibandingkan untuk sekolah dasar. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan pemerintah cenderung terkonsentrasi meningkatkan tamatan pendidikan SMP sebagai ujung dari program wajib belajar sembilan.



Sumber : BPS, 2020

**Gambar 6.**  
**Scatter Plot Anggaran Pendidikan dengan Tamatan Pendidikan SD Provinsi di Indonesia Tahun 2020**



Sumber : BPS, 2020

**Gambar 7.**  
**Scatter Plot Anggaran Pendidikan dengan Tamatan Pendidikan SMP Provinsi di Indonesia Tahun 2020**

Berdasarkan isu mengenai belum menunjukkan hasil yang optimal dalam meningkatkan output pendidikan, masih terjadi ketimpangan wilayah sekolah antar daerah yang dekat dengan jumlah sekolah dengan jarak yang jauh dengan sekolah dan masih terkonsentrasi tamatan pendidikan SMP sebagai ujung dari program wajib belajar sembilan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar dukungan pemerintah dalam mencapai keberhasilan program wajib belajar 9

tahun yang selama ini masih banyak daerah belum memenuhi program tersebut. Selain itu, hal lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama masih memiliki gap yang cukup jauh. Oleh karena itu, dalam penelitian akan melihat variabel dan nilai koefisien variabel bebas yang paling mempengaruhi tamatan SD dan SMP.

## METODE PENELITIAN

Variabel tamatan pendidikan menjadi proksi dari capaian pendidikan sebagai variabel tidak bebas. Sedangkan variabel bebasnya adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPEND), rasio murid dan guru (RMG), PDRB perkapita (PDRBKAP) pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PKES) dan jumlah sekolah (INFRA). Ruang lingkup penelitian adalah skala provinsi dengan menggunakan data yang tergabung dari cross section dan *time series* (panel data). Periode penelitian dimulai dari tahun 2016-2020. Model yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dua persamaan dengan memisahkan variabel tidak bebas yaitu lulusan SD dan SMP

Penggunaan variabel tidak bebas pada tamatan sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menunjukkan sejauhmana variabel bebas mempengaruhi program wajib belajar 9 tahun. Adapun model yang digunakan ini mengadopsi beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut.

$$sd_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 pend_{it} + \alpha_2 pkes_{it} + \alpha_3 rmg_{it} + \alpha_4 pdrbkap_{it} + \alpha_5 infra_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (1)$$

$$smp_{it} = \beta_0 + \beta_1 ppend_{it} + \beta_2 pkes_{it} + \beta_3 rmg_{it} + \beta_4 pdrbkap_{it} + \beta_5 infra_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (2)$$

Data penelitian yang digunakan didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Neraca Pendidikan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemilihan model terbaik dengan menggunakan Uji Chow untuk melihat model penelitian yang paling cocok menggunakan common effect atau fixed effect. Apabila hasil dari Uji Chow menggunakan *fixed effect* maka dilakukan pengujian Hausman untuk menentukan model yang terbaik menggunakan fixed effect atau random effect. Kemudian penelitian ini akan dilakukan uji statistic dan asumsi klasik. Uji statistic yang dilakukan yaitu Uji t, Uji F dan uji asumsi klasik (Multikonearitas, Autokorelasi dan Heterokedastisitas).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari dua bentuk persamaan menggunakan regresi *Generalized Least Square* (GLS). Hasil dari kedua persamaan dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. Pada persamaan pertama menunjukkan model yang digunakan adalah model *fixed effect*, dikarenakan hasil Uji Chow dan Uji Hausman sebesar  $0.000 < \text{degree of freedom}$ . Persamaan kedua hasil Uji Chow sebesar  $0.000 < \text{degree of freedom}$  dan Uji Hausman sebesar  $0.0002 < \text{degree of freedom}$  maka model pada persamaan kedua menggunakan *fixed effect model* (adapun pengujiannya dapat dilihat pada lampiran 1).

**Tabel 1.**  
**Hasil Regresi**

Variabel	Sekolah Dasar		Sekolah Menengah Pertama	
	Koef	Prob	Koef	Prob
C	67.22477	0.000	-20.3944	0.488
LOG(PDRBKAP)	0.058739	0.392	0.043524	0.875
LOG(LPKES (-1))	0.121828	0.077	0.419092	0.000
LOG(PPEND)	0.216932	0.000	0.232683	0.000
INFRA	0.003919	0.003	0.019269	0.002
RMG(-1)	0.03563	0.006	0.038137	0.026
Adj R Square	0.879811		0.937958	
F Stat	34.04553		67.088	
Prob F Stat	0.000		0.000	

*Sumber* : Hasil Pengolahan

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan estimasi secara parsial atau masing-masing variabel bebas, dimana hanya variabel PDRB perkapita tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, sedangkan variabel bebas lainnya mempengaruhi signifikan terhadap variabel tidak bebas dalam setiap persamaan. Selanjutnya hasil F Statistic mempengaruhi variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Persamaan pertama menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas (sekolah dasar) dari masing-masing nilai koefisien. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun sebelumnya (LPKES(-1)) mempengaruhi signifikan terhadap tamatan pendidikan SD. Nilai koefisien LPKES (-1) sebesar 0.121828, setiap kenaikan satu persen dari LPKES (-1) akan meningkatkan tamatan pendidikan sekolah dasar sebesar 0.121828%. Anggaran pemerintah sektor pendidikan mempengaruhi signifikan terhadap tamatan sekolah dasar. Koefisien dari anggaran pemerintah sektor pendidikan (PPEND) sebesar 0.216932, maka setiap kenaikan 1% dari LPPEND akan meningkatkan tamatan pendidikan SD sebesar 0.121828%. Variabel gedung sekolah mempengaruhi signifikan terhadap tamatan pendidikan sekolah dasar. Nilai koefisien jumlah gedung sekolah (INFRA) sebesar 0.003919. Kenaikan satu ribu dari infra akan meningkatkan tamatan pendidikan sebesar 0.003919%. Kemudian variabel rasio murid dan guru tahun sebelumnya mempengaruhi signifikan terhadap lulusan sekolah dasar. Variabel rasio murid guru (RMG) tahun sebelumnya dengan koefisien sebesar 0.03563, kenaikan satu persen dari rmg akan meningkatkan tamatan pendidikan sebesar 0.03563%.

Persamaan kedua akan menjelaskan pengaruh variabel bebas mempengaruhi tamatan pendidikan SMP sebagai variabel tidak bebas. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun sebelum (LPKES (-1)) terhadap tamatan pendidikan SMP mempengaruhi secara signifikan. Koefisien dari LPKES (-1) sebesar 0.419092, kenaikan satu persen dari LPKES (-1) akan berdampak peningkatan tamatan pendidikan sebesar 0.419092%. Kemudian anggaran pemerintah sektor pendidikan (PPEND) mempengaruhi signifikan terhadap tamatan pendidikan SMP. Nilai koefisien dari lppend sebesar 0.232683, jadi setiap kenaikan lppend 1% akan meningkatkan tamatan pendidikan SMP sebesar 0.232683%. Variabel jumlah gedung sekolah (infra) mempengaruhi tamatan pendidikan secara signifikan. Nilai koefisien dari infra sebesar 0.019269, setiap kenaikan jumlah gedung sekolah dalam satuan ribu akan meningkatkan tamatan pada sekolah menengah pertama sebesar 0.019269%. Selanjutnya rasio murid guru tahun sebelumnya (RMG (-1)) berpengaruh signifikan terhadap tamatan pendidikan SMP. Nilai Koefisien dari RMG (-1) yaitu 0.038137, kenaikan satu persen dari rmg (-1) berdampak terhadap peningkatan tamatan pendidikan SMP sebesar 0.038137%.

Variabel yang paling mempengaruhi terhadap tamatan pendidikan jenjang sekolah dasar adalah pengeluaran pemerintah sektor pendidikan. Penelitian Iqbal et al (2016), bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi pencapaian pendidikan. Baldacci, Guin-Siu, & de Mello, (2003) menunjukkan bahwa anggaran pendidikan dapat mendorong tingkat partisipasi sekolah. Sama halnya dengan penelitian dari (Gupta, Verhoeven, & Tiongson, 2002) yang mengindikasikan bahwa pengeluaran publik yang tinggi akan berdampak positif terhadap pencapaian pendidikan di sekolah dasar dan menengah.

Lebih jauh, bahwa beberapa studi menyebutkan bahwa anggaran pendidikan menjadi salah satu penentu keberhasilan pada output pendidikan terutama pendidikan jenjang dasar. Semakin banyak penduduk berusia sekolah maka pemerintah mengeluarkan anggaran yang mengarah ke sarana dan prasarana pendidikan. Anggaran pendidikan yang dikeluarkan pemerintah tidak terlepas untuk memenuhi infrastruktur sekolah seperti jumlah sekolah, pembangunan gedung dan guru. Oleh karena itu, infrastruktur (gedung sekolah) mempengaruhi positif dan signifikan terhadap tamatan pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hasil penelitian Dewi & Soebijarto (2019) menjelaskan bahwa, ketersediaan sekolah akan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Neilson & Zimmerman (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pembangunan sekolah dapat meningkatkan pendaftaran sekolah. Khairunnisaa *et al* (2014) menjelaskan bahwa, jumlah sekolah yang sedikit akan membuat biaya pendidikan menjadi lebih mahal dikarenakan jarak yang jauh menuju sekolah membutuhkan biaya transportasi yang cukup mahal bagi keluarga yang kurang mampu sehingga, keluarga yang tidak mampu akan memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya.

Selain itu, tamatan pendidikan SD dan SMP menjadi dasar keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Sarana infrastruktur sekolah akan memberikan dukungan dalam proses pembelajaran di sekolah meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung. Setelah pembangunan infrastruktur sekolah terpenuhi, maka pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan pada jenjang sekolah di program wajib belajar 9 tahun. Salah satu menjaga kualitas pendidikan dengan memperhatikan beban guru terhadap murid yang diajarkan di suatu kelas. Rasio murid dan guru mempengaruhi secara tidak langsung terhadap tamatan pendidikan (SD dan SMP). Kontribusi dari rasio murid dan guru akan terlihat ketika ada penambahan tamatan pendidikan di tahun berikutnya. Studi dari Destilluna dan Zain (2015) menenjelaskan dalam penelitiannya, rasio murid dan guru memiliki pengaruh signifikan pada peningkatan IPM. Penelitian yang dilakukan oleh Hartono dan Setiadi (2022) mengenai ketidaktuntasan belajar 12 tahun di Sumatera Selatan menjelaskan bahwa rasio guru dan murid mempengaruhi tidak tuntasnya penduduk umur 18-24 tahun dalam belajar 12 tahun. Bahkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koca dan Celik (2015), kota-kota yang memiliki prestasi rendah pada ujian transisi ke pendidikan tinggi cenderung memiliki jumlah murid per guru lebih besar.

Peningkatan jumlah murid yang ditangani oleh jumlah guru yang terbatas yang menjadi persoalan kurangnya jumlah guru sehingga dengan penambahan jumlah guru dibarengi dengan peningkatan jumlah sekolah. Kemudian pengeluaran pemerintah sektor kesehatan menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan kualitas SDM. Meskipun dalam penelitian ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap tamatan pendidikan (SD dan SMP). Seperti pada penelitian Mongan (2019), pengeluaran pemerintah pusat memiliki pengaruh nyata pada IPM, yang mana kualitas sumber daya manusia tercermin dari IPM itu sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016) juga memiliki hasil yang sama, yaitu pengeluaran pemerintah untuk kesehatan mempengaruhi IPM secara signifikan. Dalam penelitian Rahmi dan Putera (2019) dijelaskan bahwa, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dapat meningkatkan angka harapan hidup seseorang. Pemerintah mengeluarkan anggaran kesehatan untuk mencerdaskan masyarakat selain pengeluaran pendidikan.

Penduduk usia sekolah yang sehat diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah mempersiapkan anggaran kesehatan untuk membekali kondisi kesehatan yang baik sejak usia dini

sehingga sejak usia sekolah sudah dapat mengikuti dan memahami pendidikan di bangku sekolah. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan meskipun sebagai variabel bebas yang paling mempengaruhi terhadap tamatan pendidikan SD dan SMP belum memberikan kontribusi yang cukup besar yang dilihat dari nilai koefisien. Khususnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan meskipun UU No 20 Tahun 2003 untuk mengalokasikan 20% dari APBD dan APBN belum menunjukkan hasil yang cukup besar dalam meningkatkan kualitas SDM yang dilihat dari tamatan pendidikan. Kontribusi pengeluaran pemerintah pendidikan yang cukup rendah akan mempengaruhi perkembangan program wajib belajar 9 tahun.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, menyimpulkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan menjadi variabel yang paling mempengaruhi terhadap tamatan pendidikan SD. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun sebelumnya merupakan variabel bebas yang paling mempengaruhi tamatan pendidikan SMP. Variabel bebas lainnya yaitu variabel infra (jumlah gedung sekolah) dan rasio murid dan guru berpengaruh signifikan terhadap tamatan pendidikan SD dan SMP. Penambahan jumlah guru seiring dengan peningkatan penduduk usia sekolah untuk memenuhi proses pengajaran yang dibarengi dengan peningkatan jumlah sekolah baik penambahan ruang kelas maupun gedung sekolah. Dalam penelitian ini, PDRB perkapita tidak mempengaruhi signifikan terhadap tamatan pendidikan, hal ini masyarakat yang bersekolah SD sampai dengan SMP diberi subsidi oleh pemerintah. Pemberian subsidi pemerintah terhadap masyarakat yang bersekolah membuat pendapatan masyarakat tidak begitu besar dalam biaya sekolah sehingga PDRB perkapita tidak mempengaruhi tamatan pendidikan. Dalam penelitian ini, anggaran pemerintah menjadi suatu kebijakan pemerintah yang relevan untuk meningkatkan capaian pendidikan. Pendidikan sekolah dasar dan menengah pertama menjadi bahan pertimbangan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM. Selain itu perkembangan wajib belajar 9 tahun menjadi bahan evaluasi efektifitas anggaran pendidikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah ketika mengeluarkan anggaran pendidikan.

## REFERENSI

- Baldacci, E., Guin-Siu, M. T., & de Mello, L. (2003). More on the effectiveness of public spending on health care and education: A covariance structure model. *Journal of International Development*, 15(6). <https://doi.org/10.1002/jid.1025>
- Destilluna, F. G., & Zain, I. (2015). Pengaruh dan Pemetaan Pendidikan, Kesehatan, serta UMKM terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel dan Biplot. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 4(2), 292–298.
- Dewi, D. C., & Soebijarto, E. (2019). Determinan Partisipasi Sekolah Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia Tahun 2015. *Journal of Statistical Application and Computational Statistics*, 11(2), 40–59.
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies. *European Journal of Political Economy*, 18(4). [https://doi.org/10.1016/S0176-2680\(02\)00116-7](https://doi.org/10.1016/S0176-2680(02)00116-7)
- Hartono, B., & Setiadi, Y. (2022). Analisis Determinan Ketidaktuntasan Belajar 12 Tahun Penduduk 18-24 di Provinsi Sumatera Selatan 2019. *Prosiding Pendidikan Matematika Dan Matematika*, 5(2721), 1–10.
- Khairunnisaa, Hartoyo, S., & Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat Determinant of Junior Secondary School Enrollment Rate in West Java. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91–112.
- Koca, N., & Celik, B. (2015). The Impact of Number of Students per Teacher on Student Achievement. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 177(July 2014), 65–70. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.335>
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan*

- Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Neilson, C. A., & Zimmerman, S. D. (2014). The effect of school construction on test scores, school enrollment, and home prices. *Journal of Public Economics*, 120, 18–31. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.08.002>
- Rahmi, N., & Putera, A. (2019). Kesejahteraan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan harapan hidup di Provinsi Aceh: Sebuah pendekatan data panel. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 31–37. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8946>
- Safitri, I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Prov Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1, 66–76.

## Lampiran

Uji Chow persamaan tamatan pendidikan sekolah dasar  
 Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	47.414305	(30,118)	0.0000
Cross-section Chi-square	395.646281	30	0.0000

Uji Hausman persamaan tamatan pendidikan sekolah dasar

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.537558	5	0.0010

Uji Chow persamaan tamatan pendidikan sekolah menengah pertama

Redundant Fixed Effects Tests  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	49.865981	(30,118)	0.0000
Cross-section Chi-square	402.829115	30	0.0000

Uji Hausman persamaan tamatan pendidikan sekolah menengah pertama

Correlated Random Effects - Hausman Test  
 Equation: Untitled  
 Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	24.038182	5	0.0002